

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAN DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

A. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

1. Keadaan Geografis.

Kota Yogyakarta terletak antara 110°24'19" Bujur Timur dan antara 0715°'24" – 0749°'26" Lintang Selatan, dengan luas sekitar 32,5 Km² atau 1,02 % dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 Km dari Barat ke timur kurang lebih 5,6 Km.

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar antara 0 – 2 % dan berada pada ketinggian rata rata 114 meter dari permukaan air laut, Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya 1.593 hektar berada pada ketinggian antara 100-199 meter dari permukaan air laut.

Terdapat tiga sungai yang mengalir dari arah Utara ke Selatan, yaitu:

- Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota.
- Sungai Code yang mengalir di bagian tengah.
- Sungai Winongo yang mengalir di bagian barat kota.

Secara administrasi Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
- Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

Tabel II.1

Pembagian Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Luas Km2	Persentasi
1	2	3	4
1.	Mantrijeron	2,61	8,0
2	Kraton	1,40	4,3
3.	Mergangsan	2,31	7,1
4.	Umbulharjo	8,12	25,0
5.	Kotagede	3,07	9,4
6	Gondokusuman	3,99	12,3
7.	Danurejan	1,10	3,4
8.	Pakualaman	0,63	1,9
9.	Gondomanan	1,12	3,4
10.	Ngampilan	0,82	2,5
11.	Wirobrajan	1,76	5,4
12.	Gedontengen	0,96	3,0

13.	Jetis	1,70	5,2
14.	Tegalrejo	2,91	9,0
	Jumlah	32,50	100,00

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2015

Dari tabel II.1 di atas dapat dijelaskan bahwa dari 14 (empat belas) kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta, wilayah yang paling luas berada di Kecamatan Umbulharjo, dengan luas 8,12 Km² atau 25 % dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Sedangkan kecamatan yang paling sempit adalah kecamatan Pakualaman dengan luas wilayah 0,63 Km² atau sebesar 1,9 % dari luas wilayah Kota Yogyakarta.

2. Demografi.

Berdasarkan data dalam “Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2015” Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2014 sebanyak 400.467 jiwa dengan rincian sebanyak 194.828 jiwa penduduk laki-laki dan 205.639 jiwa penduduk perempuan . Dengan luas wilayah 32,5 Km², kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2014 sebesar 12,322 jiwa per Km², kepadatan penduduk dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi. Penduduk yang paling padat berada di Kecamatan Ngampilan yaitu sebesar 20.035 jiwa per Km², dan yang jarang penduduknya di Kecamatan Umbulharjo yakni 10.225 jiwa per Km². Untuk mengetahui luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan

penduduk, menurut kecamatan di Kota Yogyakarta, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.2.

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk,
Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Luas Km2	%	Penduduk	%	Kepadatan Penduduk
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mantrijeron	2,61	8,03	31.901	7,97	12.223
2.	Kraton	1,40	4,31	17.217	4,30	12.298
3.	Mergangsan	2,31	7,11	29,537	7,38	12.787
4.	Umbulharjo	8,12	24,98	83,031	20,73	10.225
5.	Kotagede	3,07	9,45	33.811	8,44	11.013
6.	Gondokusuman	3,99	12,28	45.697	11,41	11.453
7.	Danurejan	1,10	3,38	18.454	4,61	16.776
8.	Pakualaman	0,63	1,94	9.164	2,29	14,546
9.	Gondomanan	1,12	3,45	13.171	3,29	11.760
10.	Ngampilan	0,82	2,52	16.429	4,10	20.035
11.	Wirobrajan	1,76	5,42	25.039	6,25	14.227
12.	Gedongtengen	0,96	2,95	17.449	4,38	18,280
13	Jetis	1,70	5,23	23.331	5,83	13.724
14	Tegalrejo	2,91	8,95	36.136	9,02	12.418

Kota	32,50	100,00	400.467	100	12.322
Yogyakarta					

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2015

Dari tabel II.2 tersebut di atas, luas wilayah yang terluas Kecamatan Umbulharjo 8,12 Km² dengan jumlah penduduk paling banyak 83.031 jiwa, namun kepadatan penduduknya paling kecil di antara 14 Kecamatan yaitu 10.225 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kepadatan penduduk yang paling padat di Kecamatan Ngampilan dengan luas wilayah 0,82 Km², jumlah penduduknya 16.429 dengan kepadatan penduduknya 20.035 jiwa per kilometer persegi.

3. Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Yogyakarta, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta menyesuaikan kelembagaannya sesuai kewenangan daerah.

Adapun kelembagaan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD,** berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

- 1). Sekretariat Daerah;
- 2). Asisten Pemerintahan;.
- 3). Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- 4). Asisten Administrasi umum;
- 5). Bagian Tata Pemerintahan;
- 6), Bagian Hukum;
- 7). Bagian Organisasi;
- 8). Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama (Bagian P3ADK);
- 9). Bagian Pengendalian Pembangunan;
- 10).Bagian Teknologi Informassi dan Telematika;
- 11).Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi;
- 12).Bagian Umum;
- 13).Bagian Protokol.

b. Dinas Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.

- 1). Dinas Pendidikan;
- 2). Dinas Kesehatan;.
- 3). Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
- 4). Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 5). Dinas Perhubungan;
- 6), Dinas Ketertiban;

- 7). Dinas Perizinan;
- 8). Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 9). Dinas Pengelolaan Pasar;
- 10).Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan;
- 11).Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 12).Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah;
- 13).Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian.

c. Lembaga Teknis Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.

- 1) Inspektorat;
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;.
- 3) Badan Kepegawaian Daerah;
- 4) Badan Lingkungan Hidup;
- 5) RSUD;
- 6) Kantor Kesatuan Bangsa;
- 7). Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat;
- 8) .Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- 9). Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
- 10).Kantor Keluarga Berencana;

d. Kecamatan dan Kelurahan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,

Kedudukan, Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.3

Nama Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1.	Kecamatan Mantriijeron	1. Kelurahan Mantriijeron 2. Kelurahan Suryowijayan 3. Kelurahan Gedongkiwo
2	Kecamatan Kraton	1. Kelurahan Kadipaten 2. Kelurahan Patehan 3. Kelurahan Panembahan
3.	Kecamatan Mergangsan	1. Kelurahan Wirogunan 2. Kelurahan Keparakan 3. Kelurahan Brontokusuman
4.	Kecamatan Ngampilan	1. Kelurahan Ngampilan 2. Kelurahan Notoprajan
5.	Kecamatan Pakualaman	1. Kelurahan Gunungketur 2. Kelurahan Purwokinanti
6	Kecamatan Gondokusuman	1. Kelurahan Baciro 2. Kelurahan Demangan 3. Kelurahan Kotabaru

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Kelurahan Klitren 5. Kelurahan Terban
7.	Kecamatan Wirobrajan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Wirobrajan 2. Kelurahan Patangpuluhan 3. Kelurahan Pakuncen
8.	Kecamatan Gondomanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Prawirodirjan 2. Kelurahan Ngupasan
9	Kecamatan Tegalrejo	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Kricak 2. Kelurahan Karangwaru 3. Kelurahan Tegalrejo 4. Kelurahan Bener
10.	Kecamatan Jetis	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Bumijo 2. Kelurahan Gowongan 3. Kelurahan Cokrodingratan
11.	Kecamatan Umbulharjo	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Semaki 2. Kelurahan Warungboto 3. Kelurahan Pandeyan 4. Kelurahan Sorosutan 5. Kelurahan Giwangan 6. Kelurahan Muja Muju 7. Kelurahan Tahunan
13	Kecamatan Kotagede	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Rejowinangun 2. Kelurahan Prenggan

		3. Kelurahan Purbayan
14	Kecamatan Getongtengen	1. Kelurahan Pringgokusuman 2. Kelurahan Sosromenduran

Sumber : Perda Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008

Dari tabel II.3 di atas, bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta yang luasnya 32, 5 Km² mempunyai 14 Kecamatan dan 45 kelurahan, 615 RW dan 2.529 RT. Wilayah Kota Yogyakarta sangat kecil dibandingkan luas wilayah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (1,02% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta). Namun dengan wilayah yang sempit dengan tingkat kepadatan penduduk yang besar, menjadi persoalan sendiri bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, Salah satu permasalahannya adalah semakin banyak tuntutan akan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan transparan. Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun Peraturan Daerah tentang Kelembagaan sesuai regulasi/aturan dan tuntutan masyarakat.

B. GAMBARAN UMUM / PROFIL DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

1. Latar Belakang Terbentuknya Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 503/125/PUOD Tahun 1997 perihal Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan di Daerah, membentuk Unit Pelayanan

Terpadu Satu Atap (UPTSA) dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Yogyakarta. Lembaga UPTSA hanya merupakan front office, berkas permohonan izin diterima di UPTSA, kemudian diproses di Instansi teknis. Setelah izin selesai diproses dikembalikan ke UPTSA, Masyarakat pemohon izin, tahunya di UPTSA, Namun dalam pelaksanaannya tidak efektif, adanya keterlambatan proses izin, adanya KKN masih mungkin terjadi.

Untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima khususnya di bidang perizinan, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk lembaga pelayanan perizinan yang definitif berupa Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, yang disahkan tanggal 1 November 2005, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta secara resmi beroperasi sejak tanggal 2 Januari 2006. Setelah operasional selama 2 tahun, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan di Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kelembagaan baru, tetap bertahan dengan nomenklatur Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.

Terbentuknya Dinas Perizinan Kota Yogyakarta adalah karena suatu desakan atau kondisi dimana tidak adanya kepuasan masyarakat terhadap suatu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, yaitu:

1. Tidak efektif dan efisien/pelayanan lamban dan berbelit kurang professional karena rendahnya kualitas SDM dan tidak jelasnya prosedur;
2. Tidak adanya kepastian waktu dan biaya;
3. Pelayanan izin yang tersebar;
4. Overlapping layanan izin;
5. Lemahnya data base;
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi;
7. Rentan KKN;
8. Tidak adanya reward and punishment;
9. Partisipasi masyarakat kurang;

Maka dengan dibentuknya Dinas Perizinan kota Yogyakarta, untuk memperbaiki suatu pelayanan yang kurang baik dan memberikan kepuasan masyarakat pemohon izin.

Adapun Tujuan dibentuknya Dinas Perizinan adalah:

1. Tidak adanya overlapping pelayanan izin yang sama dari beberapa Instansi;
2. Keterpaduan persyaratan dalam pelayanan izin

3. Percepatan waktu proses penyelesaian izin tidak melebihi standar waktu yang ditetapkan dalam peraturan daerah;
4. Kepastian biaya pelayanan izin tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
5. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
6. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan izin;
7. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, mempunyai kewenangan, meliputi:

1. Pemberian Izin;
2. Penolakan Izin;
3. Pencabutan Izin;
4. Legalisasi izin;
5. Duplikat Izin;
6. Pengawasan Izin.

2. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perizinan, yang bertujuan untuk mewujudkan

peningkatan pelayanan di bidang perizinan dan mensinergikan berbagai macam perizinan dalam wadah pelayanan satu pintu, sehingga terwujud pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan dan pasti kepada masyarakat, sesuai

Visi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yaitu:

“Terwujudnya Pelayanan Yang Pasti Dalam Biaya, Waktu, Persyaratan dan Akuntabel di Bidang Perizinan”

Untuk mewujudkan visi tersebut yang telah dirumuskan di atas, maka

Misi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Melaksanakan Pelayanan Internal.;
2. Meningkatkan SDM yang berkualitas;
3. Melaksanakan Pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangannya;
4. Melaksanakan Pengawasan dan Penyelesaian Pengaduan Perizinan dan Advokasi;
5. Melaksanakan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
6. Melaksanakan Pengkajian Perizinan/Regulasi dan Pengembangan Kinerja.

3. Struktur Organisasi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perizinan dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perizinan. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, yang membawahi:
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubbag Keuangan
 - Kasubbag Administrasi Data dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Pelayanan, yang membawahi:
 - Kasie Advice Planing dan Administrasi Perizinan
 - Kasie Koordinasi Lapangan dan Penelitian
4. Kepala Bidang Data dan Sistem Informassi, yang membawahi:
 - Kasie Data
 - Kasie Sistem Informasi
5. Kepala bidang Pengawasan dan Pengaduan Perizinan, yang membawahi:
 - Kasie Pengawasan
 - Kasie Pengaduan Perizinan dan Advokasi

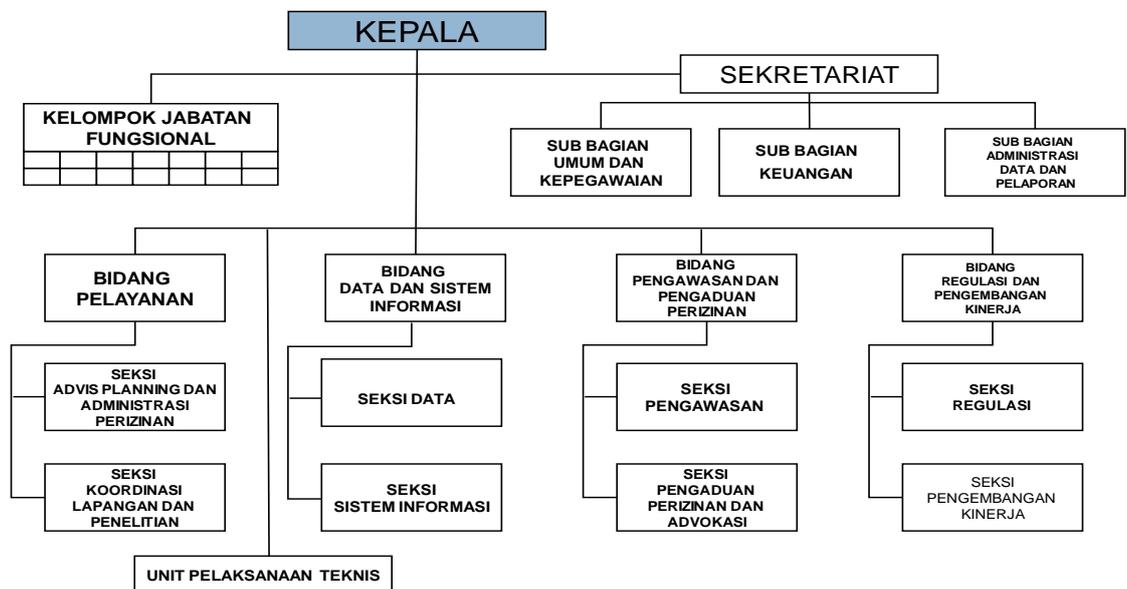
6. Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja, yang membawahi:

- Kasie Regulasi
- Kasie Pengembangan Kinerja

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:

Bagan II.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIZINAN (Perda No 10 Th 2008)



Sumber: Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008.

4. Pelayanan Di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perizinan, yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan di bidang perizinan dan mensinergikan berbagai macam perizinan dalam wadah pelayanan terpadu satu pintu, sehingga terwujud pelayanan perizinan yang pasti dalam persyaratan, waktu, biaya dan akuntabel.

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, menangani 27 Jenis pelayanan yang meliputi:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin In Gang/jalan masuk
3. Izin Penyambungan Saluran Air Limbah;
4. Izin Penyambungan Saluran Air Hujan;
5. Izin Gangguan (HO)
6. Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (TDI);
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
8. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB);
9. Izin Usaha Angkutan ;
10. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
11. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
12. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
13. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

15. Izin Pemakaman;
16. Izin Salon Kecantikan;
17. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal;
18. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
19. Izin Penjual Daging;
20. Izin Pengusaha Penggilingan Daging;
21. Izin Pengusaha Penyimpanan Daging;
22. Izin Penelitian;
23. Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL);
24. Izin Kuliah Kerja Nyata;
25. Tanda Daftar Gudang (TDG)
26. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
27. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

5. Kepegawaian Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta memiliki 84 orang pegawai terdiri: 64 orang PNS, dan 20 orang NABAN (Tenaga Bantuan), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/status pegawai

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1.	Eselon II	1 orang	Kepala Dinas
2.	Eselon III	5 orang	Ka. Bid & Sekretaris
3.	Eselon IV	11 orang	Ka. Sie & Sub
4.	Staf PNS	47 orang	Bagian
5.	Staf/Naban	20 orang	
	Jumlah	84 orang	+ 5 orang tenaga teknis

Tabel II.5

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1.	SLTP	0	-
2.	SLTA	28	9 orang NABAN
3.	SARMUD /D3	22	8 orang NABAN
4.	STRATA 1	31	3 orang NABAN
5.	STRATA 2	3	-
	Jumlah	84	+ 5 orang tenaga teknis

Tabel II.6

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Golongan IV	6	
2.	Golongan III	44	
3.	Golongan II	14	
4.	Golongan I	0	
5.	NABAN	20	
	Jumlah	84	+ 5 orang tenaga teknis

Tabel II.7

Komposisi Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

NO	MASA KERJA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	0 tahun s/d 10 tahun	38	Termasuk 20
2.	11 tahun s/d 15 tahun	22	NABAN
3.	16 tahun s/d 20 tahun	19	
4.	21 tahun s/d 25 tahun	5	
5.	26 tahun s/d 30 tahun	0	
6.	31 tahun s/d 40 tahun	0	
	Jumlah	84	+ 5 orang tenaga teknis

Tabel II.8

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis kelamin	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laki-laki	47	5 NABAN
2.	Perempuan	37	15 NABAN
	Jumlah	84	+ 5 orang tenaga teknis

6. Teknologi

Teknologi yang digunakan untuk mendukung pelayanan perizinan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis Web berupa SIM perizinan yang digunakan untuk:

- Informasi Pelayanan Perizinan,
- Antrian Pendaftaran,
- Pendaftaran Permohonan,;
- Pencetakan Surat Keputusan Izin,
- Pengendalian proses (routing slip);
- Informasi status proses (SMS Gateway).

7. Sarana dan Prasarana.

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta menempati Gedung Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Gedung tersebut disamping ditempati Dinas Perizinan juga ditempati SKPD lain yang buka counter pelayanan, seperti

izin reklame dan pajak yang dikelola Dinas Pajak Daerah dan Pengelola Keuangan (DPDPK), UPT Jamkesda yang dikelola Dinas Kesehatan, ada bank BPD, ada bank Jogja, yang menempati lantai 1, untuk lantai 2 untuk bidang pajak DPDPK, lantai 3 untuk ruang ruang rapat. Untuk Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Sarana dan Prasarana yang dijadikan inventaris Dinas Perizinan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel II.9

Daftar Inventaris Barang

SPESIFIKASI BARANG		
No.	JENIS BARANG	KET.
1.	Gedung Dinas Perijinan	1 Unit
2.	Genset	1 Unit
3.	Mobil Toyota Kijang STD KF 70	1 Unit
4.	Mobil Toyota Kijang Kapsul STD KF 90	1 Unit
5.	Mobil Suzuki APV	1 Unit
6.	Mobil Toyota Inova Type G 1.3	1 Unit
7	Sepeda Motor	13 Unit
8	Sepeda Polygon sirro	1 Unit
9.	Trolley Barang	1 buah
10.	Alat ukur jarak laser/rol meter	1/3 buah
11.	Mesin Ketik 18 manual	8 Unit
12.	Mesin Presensi Sidik Jari	1 Unit
13.	Kalkulator 12 digit	2 buah

14.	Almari Besi/kayu kecil-besar /Kitchen Set	66 buah
15.	Rak Arsip/Kayu/besi	57 buah
16.	Rak Sepatu	2 buah
17.	Filling Cabinet	48 buah
18.	Cash Box	2 buah
19.	Papan Locket	19 Unit
20.	White board Elektrik /biasa	1/3 buah
21.	Meja Kerja Kayu/besi	129 buah
22.	Meja Komputer	26 buah
23.	Meja sidang/rapat	17 buah
24.	Kursi susun/lipat	110 unit
25.	Kursi tunggu/ duduk Pemohon	32 buah
26.	Kursi Kerja/komputer	109 buah
27.	Jam dinding	12 buah
28.	Mesin penghisap debu	1 Unit
29.	Kulkas 1 Pintu	1 Unit
30.	AC	41 buah
31.	Kipas angin/ Exhouse Fan	10 unit
32.	Televisi /LCD	7 unit
33.	Tape Recorder/ Amplifier	1/2 unit
34.	Wireless	1 unit
35.	UPS	28 Unit

36	Kamera fotoDigita/Vidio	3 Unit
37.	Aquarium	1 buah
38.	Dispenser	11 Unit
39	Tempat Sampah Kayu	20 buah
40	Tabung pemadam /Yamato YA-20L	14 buah
41	PC Unit Komputer	42 Unit
42	Note Book/laptop /Komputer Tablet	10/1 Unit
43	Monitor	15 Unit
44	Layar LCD New Mark/-	1 Unit
45	Printer Laser/inkjet / Scanner	31/5 Unit
46	LCD Proyektor	2 Unit
47	Workstation Lenovo	10 Unit
48	CCTV	8 Unit
49	Mesin Faximile	1 Unit
50	Telp/Ponsel CDMA/ GSM	10 Unit

8. Fasilitas pendukung pelayanan, antara lain:

- Ruang Pelayanan Advice Palnning Loker I – VI;
- Loker Khusus difabel;
- Ruang tunggu yang representatif;
- Tempat parkir pengunjung;
- Ruang konsultasi/Sekretariat ISO;
- Ruang pelayanan pengaduan dan keluhan;

- Ruang Laktasi;
- Mushola;
- Ruang bermain Anak;
- Bank BPD;
- Bank Jogja
- Foto copy;
- Toilet untuk laki-laki, Perempuan dan difabel terpisah;
- TV cabel;
- CCTV;
- Touch Screen antrian dan informasi;
- Papan Informasi pelayanan perizinan;
- Kotak saran;
- Akses Difabel;
- Air Minum untuk Tamu/pemohon (Dispenser) ;
- Papan petunjuk arah;
- APAR;
- Jalur evakuasi.